

ABSTRAK

Mia Rahmawati (1203030069) 2024 “Pendapatan Asli Daerah Melalui Manajerial Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Pangandaran Perspektif Siyasah Maliyah”

Penelitian ini dilatar belakangi pendapatan asli daerah kabupaten Pangandaran melalui retribusi izin usaha perikanan dengan berdasarkan peraturan daerah nomor 5 Tahun 2016 Tentang retribusi izin usaha perikanan dan Peraturan daerah nomor 10 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan. Dalam hal ini realisasi dari retribusi perikanan masih cukup kecil meski mencapai target yang telah ditentukan.

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui kebijakan dari pemerintah daerah dan apa yang menjadi kendala dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Pangandaran. Dan menganalisis berdasarkan perspektif siyasah Maliyah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Pangandaran.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) teori tujuan negara, 2) teori negara kesejahteraan (*welfare state*), 3) teori kemaslahatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analisis. Karena penelitian ini jenisnya kualitatif, maka menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dimana melakukan teknik pengumpulan data berupa teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah *pertama*, Manajerial dari pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran dengan memberikan pelayanan fasilitas, dan keamanan bagi masyarakat nelayan yaitu dengan menyediakan lapangan usaha seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan untuk menjual hasil produksi ikan dan memberikan program untuk mempermudah para nelayan sebagai pelaku usaha dengan bentuk kartu KUSUKA, dan untuk para nelayan yang melakukan transaksi di Tempat Pelelangan Ikan perlu adanya NIB (Nomor Induk Berusaha). Kemudian melakukan pemungutan retribusi berdasarkan PERDA Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2016. *Kedua*, Kendala dan hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah masih terdapat nelayan yang menjual hasil tangkapannya kepada para tengkulak. Hal tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah dari sektor perikanan berkurang. *Ketiga*, analisis Siyasah Maliyah terhadap PAD melalui manajerial retribusi izin usaha perikanan telah dijalankan sesuai dengan syariat islam dan peraturan yang berlaku dengan mementingkan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Retribusi, Manajerial*

ABSTRACT

Mia Rahmawati (1203030069) 2024 "Regional Original Income Through Managerial Fishery Business License Retribution in Pangandaran Regency from Siyasaah Maliyah Perspective"

This research is based on the original regional income of Pangandaran district through fishery business permit levies based on regional regulation number 5 of 2016 concerning fishery business permit levies and regional regulation number 10 of 2022 concerning the organization and management of fish auction sites. In this case, the realization of the fisheries levy is still quite small even though it has reached the predetermined target.

The aim of the research is to find out the policies of the regional government and what are the obstacles in increasing local original income in Pangandaran district. And analyzed based on the Maliyah siyasah perspective in increasing local original income in Pangandaran district.

The theories used in this research are: 1) state goal theory, 2) welfare state theory, 3) benefit theory.

The research method used in this research is descriptive analysis. Because this research is qualitative, it uses an empirical juridical approach. Where data collection techniques are carried out in the form of observation, interviews and documentation techniques.

The results obtained in this research are first, Managerial from the regional government of Pangandaran Regency by providing facilities and security services for the fishing community, namely by providing business fields such as Fish Auction Places (TPI) and Fish Markets to sell fish production and providing programs to make it easier fishermen as business actors with the form of a KUSUKA card, and for fishermen who carry out transactions at the Fish Auction Place, they need to have an NIB (Business Identification Number). Then collect the levy based on the Pangandaran Regency PERDA Number 5 of 2016. Second, the problem and obstacle experienced by the Pangandaran Regency Government is that there are still fishermen who sell their catch to middlemen. This can have an impact on reducing regional original income from the fisheries sector. Third, Siyasaah Maliyah's analysis of PAD through managerial fisheries business permit levies has been carried out in accordance with Islamic law and applicable regulations with prioritization of the benefit of the people.

Regional Income, Retribution, Managerial